



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1-2
1.2 DASAR HUKUM	2-3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI.....	4-6
1.4 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI SKPD	6
1.5 PRODUK DAN LAYANAN	7
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	8-9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Visi	10
2.2. Misi	11-12
2.3. Tujuan	12-13
2.4. Sasaran Strategi.....	13
2.5. Indikator Kinerja Utama	14-16
2.6. Program dan Kegiatan	17-19
2.7.Perjanjian Kinerja	19-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN ATAS KINERJA SKPD	21-25
3.2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	25-31
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31-39
BAB IV PENUTUP	40
4.1. KESIMPULAN	40
4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	41
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja tersebut berdasarkan tolok ukur Rencana Strategi (Renstra).

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini merupakan tolok ukur penyusunan laporan kinerja tahun anggaran berikutnya, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 24 Januari 2019

Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,
Sekretaris



Dra. Nunun Trisnani

NIP. 19621110 199003 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai Rencana Kinerja Tahun 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja Utama yang diwujudkan dalam 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut telah dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pencapaian program dan kegiatan dengan tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 92,67 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan Tahun 2019 secara keseluruhan menunjukkan prosentase yang cukup memuaskan, meskipun dirasakan masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap mampu secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan dana/biaya meski dalam kondisi terbatas, namun juga didukung oleh semangat (*etos kerja*) melalui pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.

Ke depan pada Tahun Anggaran 2019, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut memperoleh tambahan Pegawai baik yang berstatus CPNS atau PNS, peningkatan fasilitas sarana/prasarana kerja terutama untuk bangunan gedung kantor serta dukungan anggaran yang memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodek. Akutabilitas Perintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja SKPD dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bertitik tolak dari RENSTRA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 , Rencana kerja (RENJA) dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA, realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator sasaran, dengan demikian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Tanah Laut menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan kegiatan SKPD pada Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah:

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah; dan

Tanah Laut menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan kegiatan SKPD pada Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah:

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah; dan

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri :
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepegawaian

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2019 berjumlah 52 Orang terdiri dari 28

PNS dan 24 orang tenaga PTT dengan perincian sebagai seperti tabel berikut :

1) Kepala Dinas	: 1 orang
2) Sekretaris	: 1 orang
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	: 1 orang
• Staf	: 3 orang
b. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	: 1 orang
• Staf	: 7 orang
3). Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	: 1 orang
a. Kepala Seksi Identitas Penduduk	: 1 orang
• Staf	: 1 orang
b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	: 1 orang
• Staf	: 1 orang
c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk	: 1 orang
• Staf	: - orang
4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	: - orang
Kepala Seksi Kelahiran	: - orang
• Staf	: 1 orang
b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	: - orang
• Staf	: -
c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan & Kematian	: 1 orang
• Staf	: 1 orang
5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	
Administrasi Kependudukan	: - orang
a. Kepala Seksi SIAK	: 1 orang
• Staf	: 22
d. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	: 1 orang
• Staf	: 1 orang
e. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi	: 1 orang

- Staf : -
- f. Pranata komputer pelaksana : 1 orang

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yaitu memiliki sebuah gedung kantor dengan luas tanah 1.476 m² yang terletak di Jl. Datu Daim II Nomor Telepon 21004. Dari beberapa sarana prasarana yang dimiliki terdapat beberapa peralatan yang kondisinya masih baik dan terdapat beberapa peralatan yang sudah tidak layak pakai lagi. Sedangkan untuk fasilitas kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 serta beberapa peralatan penunjang lainnya perlu penambahan hal ini dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional.

1.4. Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi SKPD Tahun 2019

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD melalui penilaian terhadap capaian kinerja.

Permasalahan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan tahunan sebagai berikut :

1. Keterbatasan tersedianya dan keterampilan aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja pelayanan.
2. Faktor teritorial geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan jarak antar kecamatan cukup jauh sehingga masih ada pelayanan yang belum memungkinkan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan cepat dan mudah.

3. Sering terjadi gangguan pada jaringan SIAK yang disebabkan oleh gangguan teknis.

1.5. PRODUK DAN LAYANAN

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut dalam menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2019 telah berpedoman pada :

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan

Sedangkan jenis layanan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pelayanan penerbitan kartu identitas diri Kependudukan, meliputi :
 - Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 - Penerbitan Kartu Keluarga perubahan
 - Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
 - Penerbitan surat keterangan pindah datang (SKPD)
 - Penerbitan surat keterangan Pindah datang orang asing (SKPDOA) tinggal terbatas
 - Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) orang asing
 - Surat keterangan pindah dari luar negeri untuk orang asing (SKPLNOA)
 - Surat keterangan datang dari luar negeri (SKDLN)
 - Surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kabupaten
 - Surat keterangan pindah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi
 - Surat keterangan pindah antar Provinsi
- b. Pelayanan Pencatatan sipil
 - Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
 - Pelayanan Pencatatan penerbitan akta kelahiran
 - Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta perceraian.
 - Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta kematian.

- Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi, Produk dan layanan, dan uraian singkat tentang sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi dan misi RPJMD, tujuan sesuai Renstra SKPD. Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan sasaran strategis dan Kebijakan serta Indikator Kinerja Utama dan Progran dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan serta perjanjian kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini memuat Capaian kinerja utama organisasi yang meliputi capaian IKU, target IKU dan uraian capaian IKU.dan akuntabilitas kinerja yang berisikan uraian tentang sasaran strategis sesuai Renstra dan target, uraian capaian sasaran misi, tabel realisasi capaian sasaran strategis serta tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis tahun tahun 2019, bab ini juga berisi mengenai ringkasan APBD tahun 2018 terhadap 2019 yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi yang berisi ringkasan jumlah sasaran yang tercapai dan tidak tercapai, perbandingan capaian sasaran 2019 dan 2018 serta langkah langkah dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI RPJMD

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu " TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTEGRASI "

1. Pernyataan visi ini mengandung makna untuk menghadirkan Kabupaten Tanah Laut yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna membangun Kabupaten Tanah Laut yang sejahtera dan tujuan mulia pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas di segala aspek. Sedangkan makna yang terkandung dalam **BERINTERAKSI**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berkarya
2. Berinovasi
3. Tertata
4. Religius
5. Aktual
6. Sinergi

2.2. Misi

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan misi sebagai berikut :

Penjabaran MISI 1 :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Penjabaran MISI 2 :

1. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat.
2. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif.

Penjabaran MISI 3 :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government).
2. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan.

Penjabaran MISI 4 :

1. Relegius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama.

Penjabaran MISI 5 :

1. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan yang terkait dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut menetapkan yaitu:

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan Masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya “ dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan Misi tersebut ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.,
2. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap kesempatan. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3. Tujuan

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan

misi serta merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misi adalah sebagai berikut :

***Meningkatkan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Aparatur
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama satu tahun. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijabarkan sebagai berikut

***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

2.5. Tabel (Tujuan, Indikator, target, sasaran, Indikator, Target 5 tahun)
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
 RPJMD

Esselon II

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,31	78,28	78,50	79	80	81,30	81,30

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

Esselon III

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,83	1	1	1	1	1	1
	Rasio bayi berakta kelahiran	0,57	0,89	0,94	0,96	0,97	1	1
	Rasio pasangan berakta nikah	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,14
	Ketersediaan database skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda	82.77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penduduk							
	Cakupan penerbitan Akta kelahiran	57,03%	89,07%	92,71%	96%	97,54%	100%	100%
	Persentase SKPD yang melaksanakan PKS pemanfaatan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.6. Indikator kinerja Utama

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil diperlukan sebuah tolak ukur yang jelas dan nyata agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan focus pada tujuan sehingga dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut lima tahun kedepan.

Selengkapnya Indikator kinerja utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanah Laut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

2.7. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan misi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 menetapkan 6 Program 27 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ii) Penyediaan jasa surat menyurat;
- iii) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- iv) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- v) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- vi) Penyediaan alat tulis kantor;
- vii) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- viii) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- ix) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- x) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- xi) Penyediaan makanan dan minuman;
- xii) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- xiii) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah.
- xiv) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- i) Pengadaan mebeleur
- ii) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- iii) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- iv) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaalisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- i) Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) ;
- ii) Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan ;
- iii) Pengembangan data base kependudukan;
- iv) Peningkatan pelayanan public dalam bidang Pencatatan Sipil ;
- v) Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan ;

- vi) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- vii) Pengembangan system administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)

2.4. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan SKPD karena merupakan proses tentang memberikan gambaran mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Dokumen Renstra, Renja dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dan perubahannya serta hasil reviu. Perjanjian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,28
2	Terwujudnya peningkatan kepemilikan dokumen kependud	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	1

		Rasio bayi berakta kelahiran	0,94
		Rasio pasangan berakta nikah	0,07
		Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,07%
		% SKPD yang melaksanakan PKS pemanfaatan Data	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN ATAS KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Target dan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama merupakan sebuah tolak ukur yang jelas dan nyata agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan focus pada tujuan sehingga dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut lima tahun kedepan. Pada tahun anggaran 2019 telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019, indikator kinerja utama tersebut adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut menetapkan target Indicator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,28	86,82 (Baik)

3.1.2 Uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja Utama (IKU) dimana capaian indikator kinerja utama memperlihatkan capaian kinerjanya telah optimal dan dapat dikatakan telah **berhasil**. Analisa lebih rinci terhadap capaian sasaran strategis diatas sebagai berikut :

Dari 150 kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang berurusan dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/18/M.PP.00.01/2018 Tanggal 3 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- a. Persyaratan Pelayanan
- b. Prosedur Pelayanan
- c. Ketepatan waktu dalam memberikan Pelayanan
- d. Kewajaran biaya
- e. Kesesuaian produk pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan
- g. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- h. kualitas sarana dan prasarana
- i. Penanganan pengaduan pengguna layanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 86,82** (ini bisa dilihat pada table pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat pada halaman berikutnya).

Dengan angka Indeks sebesar 86,82 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,3.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,6 – 3,064	65 – 76,6	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,3	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	SANGAT BAIK

Tabel 2
Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	SKM
1.	Persyaratan	3,367	84,175
2.	Prosedur	3,333	83,325
3.	Waktu Penyelesaian	3,180	79,5

4.	Biaya/ Tarif	4,000	100
5.	Produk Spesifikasi Pelayanan	3,400	85
6.	Kompetensi Pelaksana	3,373	84,325
7.	Perilaku Pelaksana	3,473	86,825
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,873	96,825
9	Sarana dan Prasarana	3,287	82,175

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,0644 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah Kewajaran Biaya (rata-rata 4,00 dengan nilai SKM sebesar = 100) karena semua penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis dan unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan (rata-rata 3,873 dengan nilai SKM sebesar = 96,825), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Waktu Penyelesaian (rata-rata 3,180 dengan nilai SKM sebesar = 79,5 dengan kriteria **BAIK**), hal ini mungkin disebabkan adanya gangguan jaringan, jumlah personil yang masih kurang.

Dengan tahun sebelumnya maka mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding tahun 2018 nilai SKM yang diperoleh adalah sebesar 86,82. Nilai rata-rata semua unsur sudah lebih dari 3,0644, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur pelayanan dengan NRR 31,80 dengan nilai SKM 86,82 perlu ditingkatkan dengan menambah petugas pelayanan, dan diharapkan

gangguan jaringan tidak terlalu sering terjadi sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-9 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur Waktu Penyelesaian. Semua unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berada dalam kategori nilai interval IKM 3,0644 dengan mutu pelayanan **BAIK**.

3.2. Capaian Strategis

3.2.1. Capaian sasaran Strategis sesuai Renstra dan target

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 berdasarkan pada rencana strategis 2018-2023 telah melakukan perjanjian kinerja tahun 2019.

Secara umum capaian sasaran strategis yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel realisasi sasaran strategis

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,28 (Baik)	86,82 (Baik)	(Baik)
2	Terwujudnya peningkatan Kepemilikan dokumen Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	1	0,98	0,98
		Rasio Bayi berakta kelahiran	0,94	0,99	0,99
		Rasio pasangan berakta nikah	0,09	0,24	0,24
		Ketersediaan data base skala provinsi	Ada	Ada	Ada
		Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	91,16%	91,16%
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,07%	63,5%	60,33%

		% SKPD yang melaksanakan PKS pemanfaatan data	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Dilihat dari tabel tersebut diatas Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan Visi tersebut pada Renstra tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019. Berikut adalah capaian kinerja SKPD yang telah ditetapkan lewat Perjanjian Kinerja. :

Sasaran Starategis kesatu yaitu : Meningkatnya kualiiitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Capaian indikator kinerja utama yang pertama yaitu Indeks kepuasan Masyarakat (SKM) telah diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,82 dari target 78,28 pencapaian ini sudah melebihi dari target target yang telah ditetapkan. Item penilaian dari hasil survey kepuasan masyarakat yang masih dinilai masih kurang terletak pada penanganan pengaduan layanan dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manuasia dalam melaksanakan pelayanan tersebut

Sasaran strategis Kedua : Terwujudnya peningkatan Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 8 (delapan) indikator yaitu :

1. Capaian indikator kinerja yang pertama yaitu rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini

adalah 1 sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 0,94 dimana penduduk yang memiliki KTP sebanyak 233.412 jiwa berbanding dengan jumlah penduduk wajib KTP yaitu 248.723 orang. Dilihat dari pencapaian kinerja masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP-el sebesar 6 % atau sebanyak 15.311 jiwa. hal ini dikarenakan penduduk tersebut keberadaan tidak dapat diketahui.

2. Capaian indikator kinerja yang kedua yaitu rasio bayi berakta kelahiran usia 0-18 tahun telah terealisasi sebesar 0,99 dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 0,94 dimana jumlah bayi berkata kelahiran sebanyak 119.795 sedangkan jumlah penduduk/bayi lahir 0-18 tahun sampai dengan tahun 2019 sebanyak jiwa 120.376.
3. Capaian indikator kinerja yang ketiga yaitu rasio pasangan berakta nikah, indikator ini dikhususkan bagi pasangan nikah yang beragama non muslim yang melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, realisasi kinerja yang telah dicapai sebesar 0,24 dari target yang ditetapkan sebesar 0,09, dimana jumlah pasangan nikah berakta nikah sebanyak 1.235 sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah sebanyak 5.212.
4. Capaian indikator ketersediaan data base skala provinsi/kabupaten untuk tahun 2019 sudah tercapai, artinya setiap data yang disajikan sudah memuat seluruh data penduduk dengan skala provinsi maupun kabupaten
5. Capaian indikator kinerja yang kelima adalah Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, untuk capaian terhadap indikator ini bahwa seluruh penduduk Kabupaten Tanah Laut Sudah memiliki KTP Nasional berbasis NIK
6. Capaian indikator kinerja utama yang keenam yaitu penerapan KTP berbasis NIK, indikator ini sudah diterapkan sejak tahun 2013
7. Capaian indikator kinerja utama yang ketujuh yaitu cakupan kepemilikan KTP elektronik, sampai dengan tahun 2019 penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda penduduk sebanyak **233.412** orang atau 93,84 dari jumlah penduduk wajib KTP yaitu sebesar 248.723 orang. Capaian indicator

tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% hal ini dikarenakan penduduk tersebut tidak berada ditempat dan keberadaan tidak dapat diketahui.

8. Capaian indikator yang ketujuh yaitu cakupan penerbitan akta kelahiran sesuai target Nasional usia 0-18 tahun harus mencapai 85 % ,sedangkan capaian target yang dicapai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah sebesar 99,52 % artinya telah melebihi dari target Nasional yang telah ditetapkan, sedangkan capaian akta kelahiran secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 sebesar 63.52% dimana jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan sebanyak 222.192 lembar (akta yang terdaftar dalam data base kependudukan) , sementara jumlah kelahiran yang terjadi sebanyak 350.007 jiwa. capaian tersebut masih dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,07% hal ini dikarenakan data awal kepemilikan akta kelahiran belum diketahui.sementara data yang bisa disajikan hanya data yang perhitungannya dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2019.

9. Capaian indikator kinerja yang kedelapan yaitu Jumlah SKPD yang melaksanakan PKS pemanfaatan data.

Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 116 % , capaian ini diperoleh dari target sebanyak 6 SKPD terealisasi 7 SKPD, realisasi ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun SKPD yang melaksanakan PKS pemanfaatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Takisung
- b. Kecamatan Bumi makmur
- c. Kecamatan jorong
- d. Kecamatan Kintap
- e. Kecamatan Batu Ampar
- f. Kecamatan Bajuin
- g. Kecamatan panyipatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas adalah :

Komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik.

Hambatan dan masalah :

Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, kualitas dan kuantitas SDM hal tersebut terkait dengan kesiapan SDM dan keterbatasan prasarana pendukung disamping itu juga kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan

Strategi upaya pemecahan :

- a) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- b) Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan sarana prasarana pelayanan pada Unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- d) Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang

mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.

- e) Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Belanja tidak langsung

Realisasi belanja tidak langsung untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Untuk belanja tidak langsung dari anggaran belanja yang tersedia, yaitu sebesar **Rp. 4.046.810.813,-** direalisasikan sebesar **Rp. 3.270.714.917,-** atau **80.82 %** jika dibandingkan tahun 2018 dimana pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.781.275.500 terealisasi sebesar Rp. **2.484.648.260,-** atau **89 %**

Anggaran belanja tidak langsung digunakan untuk melakukan pembayaran gaji PNS serta tunjangan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja.

3.3.2. Belanja Langsung

Realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 untuk belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan perbandingan pencapaian program kerja ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
-----------	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------------

		(Rp)		%
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.296.557.182,-	2.201.410.814,-	95,86%
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	204.460,-	172.000,-	84,12 %
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.706.550,-	103.477.199,-	94,32 %
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	937.502.400,-	865.002.362,-	92,27 %
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.466.000,-	14.368.000,-	87,26%
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.149.300,-	67.129.700,-	99,97%
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	255.339.000,-	250.602.046,-	98,14 %
	7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	3.765.400,-	3.765.000,-	99,99 %
	8. Penyediaan bahan bacaan dan	6.204.000,-	6.000.000,-	96,71 %

	peraturan perundangan			
	9. Penyediaan makanan dan minuman	34.130.000,-	34.118.130	99,97 %
	10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar	267.650.310,-	267.649.877,-	100 %
	11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	16.200.000,-	16.190.000,-	99,94 %
	12. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	582.239.762,-	572,936.500,-	98,40 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255.236.913,-	209.193.079,-	81,96%
	13. Pengadaan mebeleur	77.594.003,-	69.206.000,-	89,19 %
	14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.405.910,-	18.252.000,-	99,16%
	15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	112.500.000,-	87.809.989,-	78,05 %

	16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.737.000,-	33.925.093,-	72,59 %
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.915.000,-	51.230.362,-	46,61%
	17. Pendidikan dan Pelatihan formal	109.915.000,-	51.230.362,-	46,61%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.233.900,-	13.849.096,-	80,36%
	18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.994.700,-	8.781.096,-	73,21%
	19. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5.239.200,-	5.068.000,-	96,73%
V	Program Penataan administrasi Kependudukan	1.805.439.600,-	1.684.054.401,-	93,28%
	18. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	215.700.000,-	206.885.585,-	95,91%

	19. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan	292.274.600,-	267.842.000,-	91,64 %
	20. Pengembangan database kependudukan	8.940.000,-	8.700.000,-	97,32%
	21. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	44.860.000,-	37.980.000,-	84,66%
	22. Pelayanan pencatatan perkawinan	17.890.000,-	10.035.000,-	84%
	23. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	20.000.000,-	19.908.000,-	99,54%
	24. Penembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)	1.205.775.000,-	1.132.703.816,-	93,94 %
VI	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	10.553.700,-	5.544.768,-	52.54,-
	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja	10.553.700,-	5.544.768,-	52.54,-

	(renja) SKPD			
--	--------------	--	--	--

3.3.1. Ringkasan Realisasi APBD SKPD Tahun 2019 dan 2018

Ringkasan untuk realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah :

Tabel. 3.1.

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	REALISASI TAHUN 2018 (Rp)	% CAPAIAN
Pendapatan	-	-	#DIV/0!
Belanja	7.435.997.437,00	5.701.995.768,00	130,41
Belanja Langsung	4.165.282.520,00	3.217.347.508,00	129,46
Belanja Tidak Langsung	3.270.714.917,00	2.484.648.260,00	131,64

Pada tabel 3.1. diatas dapat dilihat bahwa perbandingan tahun 2019 dan 2018:

- Tidak terdapat Pendapatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah Rp.0. dimana sejak tahun 2014 semua pada pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimana salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua bentuk penerbitan dokumen Administrasi kependudukan tidak dipungut biaya
- Belanja langsung pada tahun 2019 sebesar **Rp. 4.494.936.295,-** ternyata terealisasi sebesar Rp. **4.165.282.520,-** atau menggunakan anggaran **92,67%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.373.570.138,-, dan terealisasi sebesar **Rp. 3.217.347.508,-** atau **95 %** dari pagu yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 pada tahun 2019 ini terjadi kenaikan anggaran sebesar **Rp. 329.653.775,-** atau **7,3%**
Alokasi anggaran pada tahun 2019 ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain untuk pengembangan data base kependudukan berupa pemeliharaan data kependudukan dan ketersediaan data skala kabupaten, pemeliharaan jaringan SIAK online serta pelayanan langsung dokumen kependudukan, mengikuti kegiatan pemeran pembangunan, dan juga digunakan untuk kegiatan rutin operasional penunjang administrasi perkatoran, penyusunan laporan keuangan,

peningkatan kapasitas aparatur serta penambahan sarana prasarana baik berupa perlengkapan maupun peralatan kantor

Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2019 dan dibandingkan dengan tahun 2018, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019 dan Dibandingkan dengan Tahun 2018

NO	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih /lebih kurang	%
1	Belanja Tidak Langsung 2019	4.046.810.813	3.270.714.917	776.095.896	81%
	Belanja Pegawai	4.046.810.813	3.270.714.917	776.095.896	81%
2	Belanja Langsung 2019	4.494.936.295	4.165.282.520	329.653.775	93%
	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	3.558.963.292	2.259.440.508	1.299.522.784	63%
	Belanja Modal	935.973.003	430.907.000	505.066.003	46%
	Jumlah	8.541.747.108	7.435.997.437	1.105.749.671	87%
	Belanja Tidak Langsung 2018	2.781.275.500	2.484.648.260	296.627.240	89%
	Belanja Langsung 2018	3.373.570.138	3.217.347.508	156.222.630	95%
	Jumlah Tahun 2018	6.154.845.638	5.701.995.768	452.849.870	-
	Lebih/kurang	2.386.901.470	1.734.001.669	652.899.801	73%

Dengan memperhatikan tabel 3.4 di atas apabila dilihat angka absolut untuk anggaran dana keseluruhan belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dari tahun 2018 ke tahun 2019. terdapat kenaikan jumlah anggaran. Dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 6.154.845.638,- dan tahun 2019 sebesar Rp.8.541.747.108,-, atau naik sebesar Rp. 2.386.901.470,- sedangkan untuk realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar Rp.5.868.162.074,- dan pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp.7.435.997.437,- atau naik sebesar Rp. 652.899.801.-

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat direalisasikan dengan baik.

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi, dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran Visi, Misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 dan khususnya untuk tahun 2019 yang juga dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Adapun Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas PNS/Non PNS melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, maupun sosialisasi;
- b. Penambahan jumlah pegawai;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana.
- i. Mengoptimalkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan langsung dengan menggunakan mobil keliling keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- ii. Peningkatan koordinasi dan konsultasi mulai tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.

Pelaihari, 24 Januari 2020

Pih. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dra. Nunun Trisnani
NIP. 19621110 199002 2 008

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. PERNTAAN HASIL REVIE TAHUN 2018
3. PENRYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
4. CASCADING / POHON KINERJA
5. CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2013-2018
6. FOTO-FOTO KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Unit Oeganisasi

2 Tugas dan fungsi
- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Melaksanakan sebagian tugas umum urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yaitu :

1. Penyusunan program dan anggaran ;

2. Pengelolaan keuangan ;

3. Penelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara ;

4. Pengelolaan ASN ;

5. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

6. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan seta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk ;

8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil ;

9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

10 Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

12. Pembinaan, koordinasi, pendendalian dibidang administrasi kependudukan ;

13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan makna alasan memilih IKU dan rumus perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Makna Indikator : Kepuasan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat dapat terpenuhi melalui produk layanan yang dihasilkan. Secara umum, kepuasan masyarakat dapat dikatakan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara produk yang diperoleh sesuai atau tidak dengan harapannya Alasan memilih Indikator :	Kepala SKPD	Semua bidang yang terkait penyelenggaraan pelayanan

			<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik - Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik - Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan - Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan masyarakat <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat, dengan perhitungan Total dari nilai persepsi per unsur x 25 (25 adalah rumus yang sudah ditetapkan dalam perhitungan nilai akhir IKM)</p>		
--	--	--	---	--	--

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Nurhayati, SH
NIP. 19621109 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2017.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
di-

Pelaihari.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/250-Insp/ 2019 tanggal 10 Juni 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai sebesar **67,80** dengan kategori **B** yang berarti secara umum implementasi

Sistem AKIP **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 24,98 dari yang diharapkan sebesar 30, atau dengan nilai sebesar 83,25 berkategori A yang berarti implementasi Perencanaan Kinerja akuntabilitas kinerjanya memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;

b. *Pengukuran Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 15,63 dari yang diharapkan sebesar 25, atau dengan nilai sebesar 62,50% berkategori B yang berarti implementasi Pengukuran Kinerja Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan;

c. *Pelaporan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 10,61 dari yang diharapkan sebesar 15, atau dengan nilai sebesar 70,71 berkategori BB yang berarti Pelaporan Kinerja sangat Baik, Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal;

d. *Evaluasi Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 5,27 dari yang diharapkan sebesar 10, atau dengan nilai sebesar 52,72% berkategori CC (**memadai**) yang berarti Evaluasi Kinerja Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar;

e. *Pencapaian Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 11,33 dari yang diharapkan sebesar 20, atau dengan nilai sebesar 56,63% berkategori B yang berarti CC (**memadai**) yang berarti Pencapaian Kinerja Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami sarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajarannya, agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- Perlu dilakukan revidi secara berkala terhadap Dokumen perencanaan yang ada, dan perbaikan tujuan dan Indikator tujuan serta target yang relevan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Pengukuran Kinerja :

- Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*.

Pelaporan Kinerja :

- Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja ;
- Untuk menjamin keandalan data kinerja, perlu ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan dan analisis data kinerja.


Evaluasi Internal

- Perlu dibuat rencana aksi dan dilakukan pemantauan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Perlu pemanfaatan hasil evaluasi rencana aksi dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Pencapaian Kinerja :

- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja.
- Perlunya ditingkatkan pencapaian target kinerja sehingga nilai hasil evaluasi dapat mengalami kenaikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan beberapa saran untuk ditindak lanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Inspektur,
H. Sutrisno, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601128 198202 1 003

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari sebagai laporan.
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta.

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KOMPONEN/SUB-KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	83.25%	24.98
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	86.25%	8.63
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00
	1 Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00
	2 Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
	3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00
	4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00
	5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
	6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00
	7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00
	8 Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00
	9 Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	87.50%	4.38
	10 Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00
	11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00
	12 Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
	13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
	14 Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75
	15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0.75
	16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0.75
	17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0.75
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	75.00%	2.25
	18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0.75
	19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75
	20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0.75
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	81.75%	16.35
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00
	1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
	2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
	3 PK telah menyajikan IKU		A	1.00
	4 PK telah dipublikasikan		Y	1.00
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	87.50%	8.75
	5 Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
	6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
	7 Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75
	8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75
	9 Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0.75
	10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0.75
	11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75
	12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
	13 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00
	14 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	60.00%	3.60

15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75
		25.00	62.50%	15.63
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		5.00	87.50%	4.38
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)				
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0.75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0.75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
		12.50	85.00%	8.13
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)				
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
		7.50	41.67%	3.13
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0.50
19	IKU telah direvisi secara berkala		C	0.50
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-
		15.00	70.71%	10.61
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		3.00	100.00%	3.00
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
		7.50	65.43%	4.91
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)				
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0.75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperianikan		B	0.75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75

11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja beserta hambatan/nyanya		C	0.50
2	Evaluasi <i>program</i> telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0.67
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	47.33%	2.37
5	Evaluasi <i>program</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0.50
6	Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
7	Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0.50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0.34
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	37.50%	1.13
11	Hasil evaluasi <i>program</i> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0.25
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	56.63%	11.33
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	46.67%	3.50
1	Target dapat dicapai		C	1.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0.50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	156.50%	7.83
4	Target dapat dicapai			0.60
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2.55
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1.93
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2.75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	67.80%	67.80



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Hj. Norhayati, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut



Hj. NORHAYATI
NIP. 196211091992032006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
 Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2019

PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Tanah Laut

Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	1
	2 Rasio bayi berakte kelahiran	0,94
	3 Rasio pasangan berakta nikah	0,09
	4 Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Ada
	5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
	6 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
	7 Cakupan Penerbitan akta kelahiran	89,07%
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,28
	9 % SKPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.531.996.682,00	APBD
2. Peningkatan Sarana Prasana Aparatur	252.430.913,00	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.915.000,00	APBD
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.233.900,00	APBD
5. Penataan Administrasi Kependudukan	1.785.439.600,00	APBD
6. Perencanaan Pembangunan Daerah	10.553.700,00	APBD

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA

Pelaihari, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT



DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARISA HUSNA A.md
Jabatan : Plt. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2019

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP.19621109 199203 2 006

PIHAK PERTAMA,
Plh. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

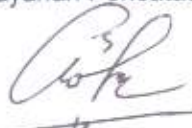
ARISA HUSNAH, Amd
NIP. 19620104 198602 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kuliatas penyelenggaraan Pelayanan pencatatan sipil	1	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	89.07%
		2	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	100%
		3	Rasio pasangan berakta nikah	0,08
		4	Rasio bayi berakta kelahiran	0.89

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penataan Administrasi Kependudukan	62.750.000,00	APBD

Pelaihari, Januari 2019
Plt. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil


 ARISA HUSNAH, A,md
 NIP. 19620104 198602 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RACHMALINA
Jabatan : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2019

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

PIHAK PERTAMA,
Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk

Dra. Hj. RACHMALINA
NIP. 19650101 198903 2 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	1	Cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) (%)	100%
		2	Cakupan kepemilikan kartu keluarga (KK) (%)	100%
		3	Cakupan pelayanan pindah datang	100%
		4	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	100%
		5	Cakupan pelayanan pendataan penduduk	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penataan administrasi Kependudukan	1.498.049.600,00	APBD

Pelaihari, Januari 2019
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Dra. Hj. RACHMALINA
NIP. 19650101 198903 2 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan dan data kependudukan	1 Persentase penyelesaian gangguan jaringan SIAK	100%
		2 Persentase tersusunnya data kependudukan	100%
		3 Persentase Perjanjian Kerjasama Sama pemanfaatan data yang ditindaklanjuti	100%
		4 Persentase Inovasi pelayanan yang dilaksanakan	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penataan Administrasi Kependudukan	224.640.000,00	APBD

Pelaihari, Januari 2019
Plt. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data


BAMBANG ADIWIJAYA, S.Kom
NIP. 19810621 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan dan data kependudukan	1 Persentase penyelesaian gangguan jaringan SIAK	100%
		2 Persentase tersusunnya data kependudukan	100%
		3 Persentase Perjanjian Kerjasama Sama pemanfaatan data yang ditindaklanjuti	100%
		4 Persentase Inovasi pelayanan yang dilaksanakan	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penataan Administrasi Kependudukan	224.640.000,00	APBD

Pelaihari, Januari 2019
Plt. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data


BAMBANG ADIWIJAYA, S.Kom
NIP. 19810621 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. IDA ARLIANI, S.Sos
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Kepegawaian dan Umum,

Hj. IDA ARLIANI, S.Sos
NIP. 19660916 198602 2 004

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. IDA ARLIANI, S.Sos
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2019

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Kepegawaian dan Umum,

Hj. IDA ARLIANI, S.Sos
NIP. 19660916 198602 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Fasilitasi Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	Persentase aset yang dicatat sesuai ketentuan	90%
	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	204.460,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	106.706.550,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	440.038.400,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.466.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	47.252.800,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.139.000,00
7	penyediaan komponen instalasi/listrik dan bangunan	3.765.400,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6.204.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	34.130.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	217.650.310,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	16.200.000,00
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penyediaan jasa perunjang kinerja SKPD	582.239.762,00
	pengadaan mebeleur	77.594.003,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.599.910,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	112.500.000,00
17 Peningkatan kafeasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.737.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	109.915.000,00
Jumlah		1.894.342.595,00

Pelaihari, 2019
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


H. Ida Yuliani, s.S.Sos
Nip. 19660216 198602 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFAHMI, S.Sos

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP.19621109 199203 2 006

Pelaihari, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

ZULFAHMI, S.Sos
NIP. 19670630 198803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Penyusunan Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen
	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	6 Dokumen
	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.994.700
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.239.200
3. Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	10.553.700
Jumlah		27.787.600

Pelaihari, 2019

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan,

Zulfahmi, S.Sos
Nip. 196706031989031007.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan pendataan penduduk	Persentase permohonan disabilitas yang terdata	100%
	Persentase penduduk rentan administrasi kependudukan yang terdata	100%
	Persentase penduduk yang belum terdata	100%
	Persentase pemenuhan pelayanan SKTT bagi WNI WNI	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	292.274.600
	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)	1.205.775.000
Jumlah		1.498.049.600

Pelaihari, 2019

Kasi Pendataan Penduduk,


Siti Khairiah, S.Kom
Nip. 19820424 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. RAWANI, S.Sos

Jabatan : Kasi Pindah Datang / Datang Penduduk

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

Pelaihari, 2019

PIHAK PERTAMA,
Kasi Pindah datang Penduduk

H. RAWANI
NIP. 19620302 198602 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan Pindah Datang	Persentase Permohonan Pembuatan pindah datang	100%
	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelayanan pindah datang yang ditindaklanjuti	100%

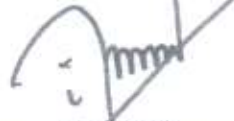
Program

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Pelaihari , 2019

Kasi Pindah Datang,



H. RAWANI
NIP. 19620302 198602 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL RAHIM NOOR, S.Sos
Jabatan : Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2019

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

PIHAK PERTAMA,
Inovasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan


ABDUL RAHIM NOOR, S.Sos
NIP. 19750816 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Data, Pembuatan Rancangan Inovasi Pelayanan	Persentase permohonan kerjasama pemanfaatan data yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase rancangan inovasi pelayanan yang diusulkan	100%

Program	kegiatan	Anggaran (Rp)
1 Penataan Administrasi Kependudukan	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	15.000.000,00
Jumlah		15.000.000,00

Pelaihari, 2019

Kasi Inovasi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan,

Abdul Rahim Noor, S.Sos
Nip. 19750815 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGARA SUROYO, Amd

Jabatan : Kasi Pengolahan data dan penyajian data kependudukan

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

Pelaihari, 2019

PIHAK PERTAMA,
Kasi Pengolahan data dan penyajian
data kependudukan

ANGGARA SUROYO, A, Md
NIP. 19840211 202001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Pelayanan Penyajian dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase pemenuhan pelayanan update data kependudukan	100%
	Jumlah data kependudukan yang disusun	100%
	Persentase Permohonan Pembuatan KIA	100%
	Persentase Pengaduan terkait pelayanan identitas penduduk yang ditindaklanjuti	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Penataan Administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	8.940.000,00
Jumlah		8.940.000,00

Pelalhari , 2019

Kasi Pengolah Data dan Penyajian
Data Kependudukan,



Anggara Seroyo, A.Md
NIP. 19840211 20100



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG ADIWIJAYA, S.Kom

Jabatan : Kasi Sistem informasi administrasi kependudukan

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2019

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

PIHAK PERTAMA,
Kasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

BAMBANG ADIWIJAYA, S.Kom
NIP. 19810621 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem yang dikelola	13 Tower/2 repeater

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi sistem administrasi kependudukan	200.700.000,00
Jumlah		200.700.000,00

Pelaihari, 2019

Kasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan,

Bambang Adi Wijaya, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NUNUN TRISNANI
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

Pelaihari, 2019

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris


Dra. NUNUN TRISNANI
NIP. 19621110 199003 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja utama		Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan tata kelola perencanaan dan keuangan	1	% Penyerapan anggaran	100%
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja	2	Nilai SAKIP	68
3	Peningkatan tata kelola umum dan kepegawaian	3	% Pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan	100%
		4	% Aset yang tercatat	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.531.996.682,00	APBD
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	252.430.913,00	APBD
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.915.000,00	APBD
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.233.900,00	APBD
5. Perencanaan Pembangunan Daerah	10.553.700,00	APBD
JUMLAH	1.922.130.195,00	

Pelaihari, Januari 2019

Sekretaris



Dra. Nunun Trisnani
NIP. 19670630 1989 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari Telp. 0512 21004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY ISKANDAR, S.Sos

Jabatan : Kasi Identitas Penduduk

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. NORHAYATI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. NORHAYATI, SH
NIP. 19621109 199203 2 006

Pelaihari, 2019

PIHAK PERTAMA,
Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil

BENNY ISKANDAR, S.Sos
NIP. 19600730 198201 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk	Persentase Permohonan Pembuatan KTP elektronik	100%
	Persentase Permohonan Pembuatan KK	100%
	Persentase Permohonan Pembuatan KIA	100%
	Persentase Pengaduan terkait pelayanan identitas penduduk yang ditindaklanjuti	100%

1 Program Kegiatan Anggaran (Rp)

Pelalhari , 2019
Kasi Identitas Penduduk,

BENNY ISKANDAR, S.AP
NIP. 19740501 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Persentase permohonan pembuatan akte perkawinan	100%
	Persentase Permohonan pencatatan perceraian bagi masyarakat non muslim	100%
	Persentase pengaduan masyarakat terkait pelayanan pencatatan pelayanan pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim dan perceraian yang ditindaklanjuti	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan pencatatan perkawinan	17.890.000,00
Jumlah		17.890.000,00

Pelaihari, 2019
Kasi Perkawinan dan Perceraian,

Hj. Nelly Aullah, S.Sos
Nip. 19610521 198203 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT

kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Pelayanan Perubahan Status Anak,Penerbitan Akte Kematian	Persentase permohonan pembuatan akte perubahan status anak	100%
	Persentase permohonan pembuatan akte kematian	100%
	Persentase pengaduan masyarakat terkait pelayanan penerbitan	100%
	Persentase Pengaduan terkait pelayanan identitas penduduk yang ditindaklanjuti	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Pendataan dan pelayanan pencatatan sipil		

Pelaihari , 2019

Kasi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan kematian,



Arisa Husnah, A.Md
Nip. 19620104 198602 2 006

CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2013 dan 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	4	5
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	92.6%	88.9%	82.6%	94.9%
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,43%	87,32%	91,03%	93,51%
3	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	50.14%	53.36%	57.03%	66.80%
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun	0	51,20%	97,07%	107,57%
5	Cakupan penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,18	75,67	76,31	77,7

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut

Hj. Nothayati, SH
NIP. 19621119 199203 2 006